

## AKBP Dr Wilson Bugner F Pasaribu Menjabat Kapolres Kulonprogo

WATES (KR) - AKBP Dr Wilson Bugner F. Pasaribu SIK MH menjabat Kapolres Kulonprogo menggantikan AKBP Nunuk Setiyowati SIK MH. Ratusan personel Polres Kulonprogo menyambut Kapolres baru dan melepas Kapolres sebelumnya dalam acara Farewell Parade serah terima jabatan Kapolres Kulonprogo di Mako Polres Kulonprogo, Jumat (12/7).



KR-Istimewa

**AKBP Dr Wilson Bugner F Pasaribu SIK MH (kiri) menjabat Kapolres Kulonprogo menggantikan AKBP Nunuk Setiyowati SIK MH**

AKBP Dr Wilson Bugner F. Pasaribu SIK MH sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Audit di Ditpamobvit Polda DIY. Sedangkan AKBP Nunuk Setiyowati akan bertugas di Polda Jawa Tengah.

AKBP Nunuk Setiyowati menyampaikan, selama menjabat sebagai Kapolres rekan-rekan telah menunjang kinerja, dedikasi dan loyalitas tinggi dalam pelaksanaan tugas. Diharapkan rekan-rekan personel berbuat yang sama, bahkan lebih untuk mendukung pelaksanaan kinerja Kapolres baru dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat serta menjaga

harkatmbimas sehingga situasi di wilayah Kulonprogo aman, tertib dan lancar.

"Saya sangat terbantu dan berterima kasih atas dukungan, kerjasama yang baik selama ini, hanya Tuhan yang bisa membalas kerja tulus rekan-rekan. Saya meminta maaf apabila dalam pelaksanaan tugas dan memimpin rekan-rekan ada sikap, tutur kata yang tidak berkenan dihati," kata AKBP Nunuk Setiyowati.

Sementara itu AKBP Dr Wilson Bugner F Pasaribu SIK MH atas nama Polres Kulonprogo berterima ka-

sih kepada AKBP Nunuk Setiyowati SIK SH karena sudah memimpin Polres Kulonprogo dengan sangat baik, membanggakan karena banyak prestasi yang telah dicapai.

"Tugas dan tanggung jawab ini akan tetap kami jaga. Kepada rekan-rekan diharapkan dapat bekerja dengan baik mempertahankan prestasi yang telah diukir selama ini. Dengan semangat rekan-rekan, saya yakin kita dapat mempertahankan prestasi ini dan terus berkembang kedepannya," kata AKBP Dr Wilson Bugner F. Pasaribu SIK MH. (Dan)

## DINSOS - PPA KULONPROGO TANGANI 29 DISPENSASI

# Perkawinan Usia Anak Masih Tinggi

WATES (KR) - Kasus perkawinan dini atau perkawinan usia anak di Kabupaten Kulonprogo masih tinggi. Hal tersebut terungkap atas banyaknya permohonan dispensasi yang diajukan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA).

"Kami sudah menangani 29 pengajuan dispensasi perkawinan dini. Kami tangani sejak Januari hingga Juni 2024," kata Kabid Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Dinsos-PPPA Kulonprogo, Sri Suhawati, Jumat (12/7).

Para pemohon yang mengajukan dispensasi kawin berada di rentang umur 14 sampai 18 tahun. Pe-

ngajuan kebanyakan karena kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD. Diungkapkan, pada 2023 lalu ada 54 dispensasi perkawinan anak yang pihaknya tangani. Artinya, jumlah dispensasi di 2024 ini sudah mencapai separuh dari total dispensasi di 2023.

"Kalau menurut wilayahnya, pengajuan dispensasi dilakukan secara merata di seluruh Kulon-

progo," ungkapnya menambahkan pihaknya tetap melakukan pendampingan pada anak yang mengajukan dispensasi kawin.

"Pendampingan perlu dilakukan karena anak-anak tersebut sebenarnya belum siap untuk menikah baik secara fisik maupun mental," ujar Sri.

Pihaknya melakukan berbagai upaya guna menekan kasus perkawinan dini. Di antaranya sosialisasi tanpa henti ke masyarakat hingga berkolaborasi dengan pihak terkait yang menangani dispensasi kawin. "Kami ingin sebisa mungkin angka perkawinan dini di Kulonprogo menjadi nol," jelas-

nya. Sementara itu Kepala Dinsos-PPPA setempat, L Bowo Pristiyanto mengatakan perlu dukungan semua elemen masyarakat dalam mencegah perkawinan usia anak. Termasuk dari pihak sekolah.

Pihak sekolah juga perlu ikut berperan dalam menangani perkawinan usia anak yang ditemui. Kalau tidak akan berdampak pada masa depan mereka, baik secara kesehatan maupun ekonomi.

"Sekolah juga perlu mencegah agar kasus perkawinan anak yang ditemukan tidak meluas terjadi pada pelajar lain," kata Bowo Pristiyanto.

(Ru)

## Pembangunan Sekolah Adi Widyalyaya Gautama

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking ceremony) untuk pembangunan Gedung Adi Widyalyaya Gautama di Padukuhan Bendo, Beji, Ngawen, Kamis (11/7).

Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh Pembimas Hindu DIY, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Bupati Gunungkidul dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu RI.

"Pembangunan sarana pendidikan ini pertama kali dilakukan di Gunungkidul," kata Pembimas Hindu DIY, Didik Widya Putra Lamis (11/7).

Dikatakan meskipun baru tahap groundbreaking, calon peserta didik saat ini sudah ada 11 orang.

Karena itu pihaknya



KR-Bambang Purwanto

**Bupati lakukan peletakan batu pertama Sekolah Adi Widyalyaya Gautama di Ngawen.**

berharap Tahun Ajaran 2025 mendatang Adi Widyalyaya Gautama mendapatkan izin operasional. Pembangunan gedung ini ditargetkan akan selesai dalam waktu 10 bulan ke depan dan minimal selesai 2 ruang.

"Adi Widyalyaya Gautama untuk mendukung

program pendidikan TK dan Paud yang saat ini sudah ada," ujarnya.

Bupati Gunungkidul, H Sunaryanta, menekankan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya pemerintah konsen terkait masalah pendidikan.

Kalau kualitas SDM rendah akan menjadi manusia yang selalu dikalahkan. Orang yang tidak berwawasan dihadapkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi sehingga harus terus beradaptasi. "Semoga ke depan jumlah siswanya terus bertambah," ujarnya. (Bmp)

## PR BAGI KULONPROGO

# Penertiban Tambang Ilegal

PENGASIH (KR) - Penertiban tambang ilegal yang ada di Kabupaten Kulonprogo harus bersinergi dengan Pemda DIY. Karena kewenangan tambang ada di DIY dan ini menjadi PR bagi Kulonprogo. "Dalam penertiban tambang ini ada mitigasi, kita lebih mensosialisasikan dari segi regulasi dan harus memahamkan kepada masyarakat yang namanya tambang ilegal, serta apa yang sudah menjadi arahan dari Gubernur DIY bahwa tambang ilegal harus ditutup," ungkap Pj Bupati Kulonprogo Ir Srie Nurkyatsiwi MMA se usai rapat di DPRD Kulonprogo, Kamis (11/7).

Siwi menyatakan, bahwa kita lihat betul-betulnya yang melakukan penambangan itu siapa dan bagaimana. "Kalau bicara aspek ekonomi, kita pasti harus berbenah dari seluruh sektor. Harus ada pening-

katan pemberdayaan atau pemberdayaan dari sektor lain, artinya mereka melakukan aktivitas ekonomi benar tidak, dilihat dari sisi regulasinya legal atau tidak. Kalau dia menyalahi aturan, langkahnya dilakukan pendampingan, pembinaan serta pemahaman. Itu perlu cepat dilaksanakan karena sudah ada arahan dari ngarso dalem," ucap Siwi.

Siwi menambahkan bahwa bicara penambangan itu tidak hanya bicara sekarang, tetapi ekonomi berkelanjutan. Tidak hanya dipakai sekarang tetapi masa depan anak cucu, oleh sebab itu kalau bicara pembangunan ekonomi adalah ekonomi inklusif berkelanjutan, bagaimana green ekonomi, ini yang harus ditekan dan dari semua elemen mulai dari kalurahan dan pemangku di sana juga harus punya komitmen. (Wid)

## GANDENG ORMAS KEAGAMAAN

# Diluncurkan 'Qurban for Stunting'



KR-Dedy EW

**Peluncuran 'Qurban for stunting'.**

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta meluncurkan Gerakan Peduli Gunungkidul "Qurban for Stunting" di Kantor Pelayanan Terpadu Haji dan Umroh (PLHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jumat (12/7). Dalam ajang ini diluncurkan 300 kaleng cornet yang disiap didistribusi oleh Muslimat NU dan Aisyiyah PDM.

"Pemkab memberikan apresiasi ide gagasan

membuat cornet dari daging kurban untuk ikut menangani stunting di Gunungkidul yang angkanya masih tinggi," kata Bupati Gunungkidul H Sunaryanta.

Kegiatan dihadiri Kepala Kemenag Gunungkidul KH Saban Nuroni MA, Branch Manager KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Wonosari Muhammad Budiono, perwakilan Rumah Zakat, PCNU, PDM, Muslimat NU, Ai-

siyah dan undangan. Kepala Kemenag Saban Nuroni menambahkan, pada tahap awal ini diserahkan 300 kaleng cornet daging kurban kepada muslimat dan Aisyiyah. Nantinya program ini pertama menghimpun dana dari sohobil kurban dan dibelikan hewan kurban untuk diolah menjadi cornet. Kedua yakni menerima hewan kurban dan selanjutnya diserahkan ke tempat pemotongan hewan dan diolah menjadi cornet. "Ketiga yakni menerima daging kurban dikumpulkan dan diolah menjadi cornet," ucapnya.

Saban Nuroni menuturkan, program ini melibatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diantaranya muslimat, aisyiyah serta kerjasama, BSI, Rumah Zakat dan pihak terkait. (Ded/Ewi)

## USIR MONYET EKOR PANJANG

# Gunakan Petasan, Seorang Warga Kehilangan Jari

WONOSARI (KR) - Serangan Monyet Ekor Panjang (MEP) kembali meresahkan masyarakat. Akibat ketersediaan makanan di habitatnya monyet ekor panjang kini merusak berbagai jenis tanaman pangan. Upaya mengusir satwa ini dilakukan dengan berbagai cara. Bahkan di Kapanewon Tanjungsari ada salah satu warga yang mengusirnya dengan petasan menyebabkan terluka kehilangan salah satu jari tangannya akibat terkena letusan petasan. "Petasan selama ini efektif untuk mengusir monyet ekor panjang sehingga sering digunakan," kata Sarwanto salah satu warga Gaduhan, Hargosari, Tanjungsari.

Serangan MEP di Kalurahan Hargosari, Tanjungsari ini mengalami peningkatan sejak lima tahun terakhir. Menurutnya karakter MEP mampu mengobservasi situasi. Dalam dua-tiga hari menghilang setelah diusir tetapi kemudian datang lagi merusak tanaman pangan.

Selama setahun terakhir ini ada tiga koloni. Satu koloni ada sekitar 35 ekor. Satu ladang bisa habis karena koloni ini, bahkan, ladang jagung siap panen miliknya seluas sekitar 2.000 meter persegi gagal panen. "Kami mohon agar pemerintah memberi solusi penanganan MEP tersebut," ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul, Antonius Hary

Sukmono mengatakan terkait serangan MEP pihaknya telah membuat kajian karakteristik MEP bersama akademisi.

DLH menyadari gangguan MEP tidak hanya terjadi di Kalurahan Hargosari. Hampir di seluruh kapanewon di Gunungkidul ada gangguan MEP. Sebabnya salah satunya ada keterbatasan makanan dan sumber air.

Selain itu, ekosistem MEP terganggu aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan mereka keluar dari habitatnya. "Solusi jangka pendek yang ditawarkan DLH yaitu menanam tanaman yang menjadi makanan MEP," ujarnya. (Bmp)

## SESUAIKAN UU 3 TAHUN 2024

# Bamuskal Diperpanjang 2 Tahun

WONOSARI (KR) - Menyesuaikan berlakunya Undang Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) di Kabupaten Gunungkidul dilakukan pengukuhan. Masa bakti yang semula selama 6 tahun diperpanjang menjadi 80 sesuai masa bakti lurah desa mengacu dengan undang-undang yang baru.

"Tambahnya masa jabatan ini setelah disahkannya Undang Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024," kata Bupati H Sunaryanta disela penyerahan SK perpanjangan masa bakti Bamuskal di Kapanewon Ngawen.

Bupati berharap dengan ditambahnya masa jabatan Bamuskal dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dengan baik. Salah satunya sebagai pengawas pemerintahan kalurahan maupun sebagai penjangking aspirasi masyarakat.

Hal ini sangat penting untuk disampaikan kepada pemerintah kalurahan, juga sebagai pengawas layaknya legislatif dan eksekutif. Bupati juga minta Bamuskal di se-



KR-Bambang Purwanto

**Bupati H Sunaryanta serahkan SK pengukuhan Bamuskal.**

tiap kalurahan mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kalurahan. Sehingga jika terjadi gesekan kecil dapat segera di tangani dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru.

"Gesekan sekecil apapun antara Bamuskal dengan pemerintah kalurahan jangan sampai terjadi," ujarnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Ma-

sarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sujarwo MSi mengatakan ada 6 kalurahan di Kapanewon Ngawen dan 10 kalurahan di Kapanewon Semin.

"Rata rata setiap kalurahan ada 9 Bamuskal, pelantikan dijadikan satu di masing-masing Kapanewon," ujarnya. (Bmp)



KR-Asrul Sani

**NASIONALISME: Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kulonprogo menggelar rapat koordinasi (rakor) di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kulonprogo, Jumat (12/7). Dalam rakor yang dihadiri Kabid Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol setempat, Heri Widodo MM dan Ketua FPK Yosep Ranjabar SSos serta jajaran pengurus lainnya. Dalam rakor 'Meningkatkan Semangat Nasionalisme dan Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan NKRI' jajaran pengurus FPK sepakat Semangat Nasionalisme harus terus digaungkan.**